

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang, likuiditas dan lain sebagainya. Kinerja suatu bank dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan laporan itu dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai kinerja bank.

Kegiatan usaha bank menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan atau lembaga perantara keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bisnis perbankan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan optimal dengan memberikan pelayanan berupa jasa keuangan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, manajemen perbankan harus selalu mempertahankan laba yang diperolehnya karena perolehan laba merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan bank. Bank berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Perbankan dalam

perekonomian modern merupakan industri jasa yang dominan dan menunjang hampir seluruh program pembangunan ekonomi, karena kegiatan perekonomian itu dijalankan dengan uang. Bank juga sebagai *agent of trust* yaitu lembaga yang menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan jasa yang baik kepada masyarakat. Bank juga berfungsi untuk menjaga kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Terlebih lagi dewasa ini, persaingan di dunia perbankan semakin ketat dikarenakan semakin banyaknya perusahaan perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang berlomba untuk meningkatkan daya saing di berbagai sektor yang nantinya dapat meningkatkan laba perusahaan perbankan tersebut.

Perekonomian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Keadaan tersebut disebabkan karena adanya persaingan ketat di era globalisasi dan pasar bebas kancah internasional. Terbukti dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan perbankan di Indonesia mengalami keterpurukan yang berat, banyak bank-bank dilikuidasi karena tidak mampu mempertahankan kinerjanya. Adanya krisis tersebut mempengaruhi kinerja perbankan yang mengakibatkan bank mengalami ketidakseimbangan dalam fungsi intermediasi. Dalam satu sisi, perbankan sukses dalam mengumpulkan dana masyarakat namun di sisi lain penyaluran kredit kepada masyarakat mengalami penurunan. Akibatnya bank tidak cukup kredibel dari segi profitabilitas, hal ini berdampak pada kelangsungan modal perbankan. Kerugian yang dialami bank ini semakin terasa dan mengakibatkan kebangkrutan. Pada saat itu, hampir tidak ada penegakan terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan seperti adanya konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada saat yang bersamaan, banyak bank yang sesungguhnya tidak memiliki modal

cukup atau kekurangan modal tetapi dibiarkan tetap beroperasi. Terjadi pula krisis kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Banyak masyarakat yang menarik dananya besar-besaran dari bank. Nasabahpun menilai bahwa menyimpan dana di bank sudah tidak aman lagi.

Sebagai solusi untuk menghadapi krisis tersebut, maka pemerintah melakukan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 yaitu dengan menutup bank yang bermasalah, pemberian bantuan likuiditas bank, melakukan program penjaminan pemerintah, pendirian badan penyehatan perbankan nasional, dan restrukturisasi perbankan. Selain itu, pada 9 Januari tahun 2004, Bank Indonesia mengumumkan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam rangka melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional dan membangun kembali perekonomian Indonesia. Visi API adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien agar dapat menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasca krisis 1997-1998 perekonomian di Indonesia masih naik turun, hingga pada tahun 2008 terjadilah krisis di negara adidaya Amerika Serikat yang berimbas pada perekonomian Indonesia. Akan tetapi, krisis di tahun 2008 tidak separah tahun 1997 dan tidak terlalu berdampak pada sektor perbankan di Indonesia karena kondisi fundamental perbankan cukup kuat. Akan tetapi pada tahun 2011-2014 terjadi penurunan kinerja keuangan yang dilihat dari ROA (*Return On Asset*) sebagai rasio untuk mengukur profitabilitas perbankan. Pada tahun 2011 ROA rata-rata sebesar 0,0172. Kemudian ROA rata-rata pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,0197. Namun, ROA rata-rata pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan terus menerus yaitu menjadi sebesar 0,0173 dan 0,0126.

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba. ROA mencerminkan seberapa besar laba yang bisa dicetak perusahaan dengan menggunakan seluruh asetnya. Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin tinggi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan semakin baik dalam penggunaan aset bank. Semakin besar ROA menunjukkan semakin baik kinerja suatu bank, sehingga penurunan ROA yang terjadi pada tahun 2011-2014 perlu diketahui penyebabnya.

Beberapa kajian dan penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi pengaruh suatu kinerja keuangan perbankan. Lemahnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik menjadi penyebab terjadinya ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan perbankan. Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul biaya keagenan (*agency cost*). Dalam *agency theory*, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain (*principal*) atau karyawan (*agent*) untuk dapat memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan atau melimpahkan wewenangnya terhadap agen tersebut. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan mendorong manajer untuk tidak memaksimalkan usahanya. Dalam konteks perusahaan, masalah keagenan yang dihadapi investor mengacu pada kesulitan investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan (Wulandari, 2011). Menurut Jensen dan Meckling (1976), penyebab konflik antara manajer dan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan

keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan.

Dengan teori keagenan maka dapat menjelaskan fenomena masalah keagenan di Indonesia khususnya didalam struktur kepemilikan. Shleifer dan Vishny menjelaskan bahwa manajer mengendalikan perusahaan dan masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Masalah ini disebut sebagai *Agency Problem I* (Villalonga dan Amit) atau *Type I Agency Costs* (Bozec dan Laurin). Berikutnya, pemegang saham mengelompokkan diri menjadi pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajer agar manajer menjalankan perusahaan demi kepentingan terbaik para pemegang saham. Akan tetapi, pemegang saham pengendali meminta manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri seperti pembagian dividen khusus. Hal ini merugikan pemegang saham nonpengendali. Dalam hal demikian, masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali. Konflik seperti ini disebut *Agency Problem II* (Villalonga dan Amit) atau *Type II Agency Costs* (Bozec dan Laurin).

Seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, seorang manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi yang disampaikan tersebut terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ada pada perusahaan.

Permasalahan agensi tersebut dapat memicu terjadinya biaya keagenan. Biaya keagenan dapat ditekan dengan adanya struktur kepemilikan dalam

perusahaan yaitu struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional merupakan salah satu aspek *corporate governance* yang dipandang dapat mengurangi *agency cost*. Hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional merupakan suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan yang dibuat oleh manajer. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar baik dalam bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya (Widiastuti, Pranata P.Midiastuty, dan Eddy Sutanta, 2013: 3403). Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi juga akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku *oportunistic* oleh manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Selain itu, pengawasan yang efektif dari investor institusional akan meminimalisir terjadinya manipulasi keuangan oleh manajer yang nantinya akan berpengaruh pada laba perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan nantinya akan menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan itu sendiri.

Selain kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial juga merupakan aspek *corporate governance* dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham. Pemberian kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Keterlibatan tersebut akan mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh

manajer, komisaris dan direksi perusahaan pada akhir tahun yang kemudian dinyatakan dalam presentase.

Selain struktur kepemilikan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajer, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan manajer dan akan berakibat pada kinerja keuangan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Ningsaptiti dalam Zeptian (2013: 6), perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Perusahaan yang lebih besar dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentingan investasi, karena perusahaan yang besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga dalam melakukan pelaporan akan lebih hati-hati. Perusahaan-perusahaan yang berukuran besar juga memiliki tanggungjawab yang lebih besar pula. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan besar juga akan membawa pengaruh yang besar pula terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar akan membuat manajer lebih hati-hati dalam melaporkan kinerja perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016**”.

1.2 Rumusan masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan, maka berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2016
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan serta pengalaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya tentang hasil penelitian sekarang, supaya dapat dikembangkan lagi dengan pembahasan yang berkaitan dengan Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.

3. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan mampu untuk mengembangkan, merubah, menjelaskan standar yang berlaku guna mencapai pasar modal yang efisien dan perlunya informasi yang diungkap dalam laporan tahunan.